

LAPORAN PENELITIAN

**Problematika Hukum UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam Perkembangan Arbitrase Online**



Oleh:

Dr. Ignasius Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

**Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2007**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN MANDIRI

1.a. Judul Penelitian : Problematika Hukum UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Dalam Perkembangan Arbitrase Online

1.b. Kategori Penelitian : III.

2. Peneliti

2.a. Nama : Dr. Ignasius Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

2.b. Bidang Keahlian : Cyberlaw

2.c. Pangkat dan jabatan/gol: Penata/Ass. Ahli/IIIB.

2.d. Tempat Penelitian : Jakarta dan DIY

2.e. Waktu Penelitian : 15 jam perminggu

2.f. Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2.g. Alamat surat : Jln. Mgr. Sugiyapranata 08, Klaten Utara, Klaten

Telepon : (0272) 323945, HP: 0815 7834 9007.

3. Jumlah Peneliti : Penelitian Mandiri

4. Lokasi Penelitian : Yogyakarta, Jakarta, dunia maya

5. Jangka waktu penelitian: 6 (enam) bulan

6. Biaya yang diperlukan: Rp. 2.850.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Ribu Rupiah)

Mengetahui,
Ketua Bagian Keperdataan



Iswantiningsih, S.H.,M.S.

Yogyakarta, 03 Juli 2007

Peneliti,



Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum,



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum.

Ketua LPPM



Ir. B. Kristyanto, M.Eng.,Ph.D.

PRAKATA

Syukur dan terima kasih yang berlimpah perlu saya lambungkan kepada Bapa yang mahakasih dan bertahta di kerajaan sorga, karena berkat kelimpahannya penelitian ini dapat diselesaikan.

Kebahagiaan ini bertambah sempurna seiring dengan ucapan terima kasih saya yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ketua LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Rekan-rekan yang berkantor di BANI yang membantu mencari data pendukung untuk alat recheck penelitian ini;
4. Beberapa pimpinan Internet Service Provider dan nara sumber pencipta di internet;
5. Semua saja yang membantu selesainya penelitian ini yang tidak mungkin saya sebut satu per satu;

Akhirnya menyadari setulusnya sebagai hamba Tuhan, *servio Dei*, maka dengan sujud syukur dan mengakui bahwa karya penelitian ini sangat tergantung kepada Tuhan, saya kembalikan karya yang kecil ini kepada Tuhan dan untuk kemanfaatan kepada sesama di dalam negeri tercinta dan masyarakat global pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 03 Juli 2007

Peneliti,

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

ABSTRAK

Ign. Sumarsono Raharjo

**Problematika Hukum UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dalam Perkembangan Arbitrase Online**

Perkembangan kontrak-kontrak melalui online dewasa ini telah meningkat pesat. Kondisi ini sekaligus juga menumbuhkan konflik-konflik yang tidak mudah diselesaikan karena hubungan hukum melalui online adalah khusus karena borderless dan paperless. Oleh karena itu perlu diciptakan sarana khusus untuk menyelesaikan konflik tersebut yaitu melalui Online Dispute Resolution (ODR).

Salah satu yang berkembang dari penyelesaian sengketa melalui online adalah arbitrase online. Arbitrase online berbeda dengan arbitrase internasional karena kekhasannya terletak pada penggunaan teknologi internet untuk melakukan hubungan hukum yaitu beracara, menentukan prosedur, berkomunikasi, serta pelaksanaan keputusan arbitrase.

Melalui penelitian normatif dengan pendekatan analisis statute approach, comparative approach, diketahui bahwa UU No. 33 Tahun 1999 sebenarnya tidak memadai untuk berkembangnya arbitrase online. Namun, melalui penafsiran yang luas terhadap beberapa Pasal dalam UU No. 33 Tahun 1999 dan Konvensi New York, sebenarnya arbitrase online dimungkinkan untuk diakui dan berkembang di Indonesia. Hal yang dapat dilakukan adalah bagaimana konveni dan peraturan perundangan suatu Negara mengantisipasi dan mengcover perkembangan arbitrase online sehingga putusan-putusan yang diambil dalam penyelesaian konflik tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan.

Keywords: ODR (Online Dispute Resolution), Online Arbitrase, Offline Arbitrase

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Arbitrase dan <i>Alternative Dispute Resolution</i>	5
B. Perkembangan Penggunaan Teknologi <i>Online</i> untuk ADR	8
C. Arbitrase <i>Online</i>	10
III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
A. Keaslian Penelitian	13
B. Tujuan Penelitian	14
C. Kontribusi Penelitian	15
IV. METODE PENELITIAN	17
V. ANALISIS PENELITIAN	23
A. Perkembangan Arbitrase <i>Offline</i> dan <i>Online</i>	23
A.1. Arbitrase <i>Offline</i>	23
A.2. Arbitrase <i>Online</i>	30
B. Implementasi UU No. 33 Tahun 1999 dengan Berkembangnya Arbitrase <i>Online</i>	40

B.1. Perjanjian Arbitrase dan keabsahan perjanjian arbitrase elektronik	40
B.2. Prosedur Arbitrase online	50
VI. KESIMPULAN	57
A. SIMPULAN	57
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum perdagangan internasional sekarang telah mengalami kemajuan yang besar karena setelah sejak 1 Juli 2007 kemarin dengan keberlakuan electronic UCP (e-UCP) 600 yang dimaksudkan sebagai pengakuan bukti-bukti elektronik dan transfer-transfer electronic dimaksudkan untuk mendukung berkembangnya E-commerce (E-com). Kesadaran bahwa E-com adalah merupakan salah satu instrumen yang handal dalam era globalisasi yang berkarakter extensity, intensity, velocity dan impact yang luar biasa (David Held, et.al., 2000:17) membawa dampak hubungan hukum para pihak mengalami perubahan yang cukup revolusioner. E-com telah memberi keuntungan berupa jangkauan yang luas tidak terbatas dalam scope internasional tetapi dalam suatu global reach, katalognya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan perdagangan konvensional, dengan biaya transaksi yang rendah karena pertukaran dokumen melalui internet, serta mudah untuk masuk ke dalam pasar baru karena orang yang berkunjung ke dalam situs-situs dunia semakin meningkat sehingga fleksibilitasnya sangat tinggi mengingat sifat lain yang *borderless*, *paperless*.

Fungsi hukum untuk pengembangan teknologi informasi (internet) sehingga bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan manusia mempunyai arti penting. Hukum harus dapat menyelesaikan konflik-konflik global (tidak hanya internasional) sehingga keseimbangan,

kelancaran, keadilan dan kepentingan publik dan para pihak dapat tercipta keselarasannya. Bagi hukum Nasional, mengkaji permasalahan Problematika Hukum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkembangan arbitrase *online* sangat diperlukan dengan menekankan pada *sinergi* fungsi hukum instrumen-instrumen hukum alternatif penyelesaian sengketa disatu sisi dan perkembangan internet disisi lain. Perkembangan kebijakan hukum dan peraturan yang melingkupi alternatif penyelesaian sengketa meliputi: peraturan mengenai arbitrase dan APS serta studi perbandingan berbagai peraturan mengenai arbitrase dan APS internasional untuk menciptakan harmonisasi dan unifikasi hukum.

Perkembangan selama ini terdapat dua cara dalam penyelesaian hukum substansial yaitu bagaimanakah hukum nasional negara masing-masing menyelesaikan masalah-masalah yang muncul berkenaan dengan berkembangnya transaksi-transaksi online yaitu melalui *Online Dispute Resolution (ODR)* masing-masing dan bagaimanakah lembaga-lembaga internasional menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dengan berkembangnya E-com melalui transaksi-transaksi *online*-nya. Apabila dalam forum internasional/global, dapat dipastikan terdapat standar-standar yang telah disepakati bersama melalui *model-model law* seperti halnya yang dikembangkan setelah adanya Konvensi New York 1958 dan Konvensi Washington 1965. Namun, hukum nasional masing-masing negara, khususnya Indonesia justru akan mengalami kesulitan karena untuk sahny suatu arbitrase asing diperlukan putusan pengadilan sehingga dapat dilaksanakan di Indonesia, demikian pula di beberapa

negara lain. Bagi Indonesia, disatu sisi dengan ratifikasi dua konvensi di atas, berarti Indonesia berkewajiban juga melaksanakan melalui pentaatan untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut namun disisi lain peraturan perundangan menentukan bahwa untuk keberlakuan putusan arbitrase asing harus melalui putusan Pengadilan Negeri telah menimbulkan dualisme hukum. Berbagai kasus yang sudah terjadi dan berjalan justru hal-hal seperti ini menjadi masalah. Seperti kasus Kahara Bodas LL.C (Limited Liability Company) vs. Pertamina, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase asing dan secara otonom mengadili sendiri perkara itu. Hal ini menjadi aneh karena dalam kontrak telah disepakati oleh para pihak bahwa apabila terjadi sengketa akan dibawa ke dalam arbitrase melalui klausula arbitrase. Hal ini berarti sifat putusan arbitrase yaitu "*final and binding*" harus dilaksanakan tetapi justru dipatahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih untuk kepentingan umum (*force majeure* karena krisis ekonomi) putusan arbitrase asing tersebut dibatalkan, padahal asas umum juga mengatakan "*perjanjian/kontrak harus mengikat sebagai pacta sunt servanda*".

Melalui beberapa permasalahan di atas sebagai bahan hukum untuk analisis selanjutnya. penelitian ini dimaksudkan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi/hukum *cyber* khususnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* yang bagi Indonesia sebagai area yang belum dikerjakan dengan maksimal, padahal era sekarang adalah era informasi dan komunikasi. Arbitrase *online* telah menumbuhkan permasalahan

hukum karena Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat rumusan Pasal yang tidak dapat secara memadai menjadi landasan bagi berkembangnya arbitrase *online*. Melalui kontrak-kontrak atau transaksi-transaksi elektronik, telah menumbuhkan berbagai permasalahan yang muncul berkaitan dengan yurisdiksi, hubungan hukum para pihak, sahnyanya kontrak, keamanan serta validitas dan reliabilitas pengiriman dokumen. Namun akselerasi E-com tidak dapat dihentikan sehingga hukum harus berfungsi fasilitatif untuk berkembangnya E-com tersebut.

B. Perumusan Masalah.

Bagaimanakah solusi yang harus dilakukan dengan berkembangnya arbitrase *online*, sebagai dampak dari keterbatasan fungsi Undang-Undang No. 33 Tahun 1999, sehingga putusan arbitrase *online* sah menurut hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arbitrase dan *Alternative Dispute Resolution*

Hubungan hukum yang dilakukan para pihak dalam transaksi perdagangan membutuhkan keamanan dalam berbisnis. Keamanan tersebut adalah bagaimana hukum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul dikemudian hari karena sengketa hukum akibat salah tafsir, cidera janji, *overmacht*, dan lain-lain. Pada dasarnya tidak semua orang menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Namun hukum memberikan sarana, metoda atau cara, untuk menyelesaikan berbagai kemungkinan akibat dari hubungan hukum yang dilakukan *persoon* dan atau *rechtspersoon*. Untuk menyelesaikan sengketa pada umumnya ditempuh dua cara secara garis besar yaitu litigasi (di suatu pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan) atau forum-forum yang telah disepakati sebelumnya seperti *dispute settlement body by World Trade Organisation* (WTO). Atau juga dapat digunakan proses adjudikasi semu (*Quasy Adjudicatory Processes*) yang dirancang untuk memberikan suatu pandangan lebih obyektif terhadap sengketa kepada pihak-pihak yang berperkara. Proses adjudikasi semu dirancang melalui forum: (1). Mediasi Arbitrasi (Med-Arb) yaitu proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah proses mediasi tidak berhasil. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan secara mediasi, mereka dapat melanjutkan pada proses penyelesaian sengketa secara arbitrase. Para pihak harus berusaha untuk mencapai penyelesaian sengketa

mereka melalui mediasi, tetapi jika tidak mungkin diperoleh penyelesaiannya maka dapat digunakan proses arbitrase dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan (Sudargo, 1996:96). (2). Persidangan Mini (*Mini Trial*) yaitu pemeriksaan yang hampir sama dengan pemeriksaan yuri penasehat (*advisory jury*). (3). Pemeriksaan Yuri secara sumir (*Summary Jury Trial*) yaitu mengadaptasi dari beberapa konsep persidangan mini dimana pengacara/para pihak membuat suatu presentasi ringkas tentang perkara mereka di hadapan yuri penasehat bukan yuri adjudikasi. (4). Evaluasi netral secara dini (*Early Neutral Evaluation*) yang dimaksudkan untuk penyelesaian sengketa secara damai melalui evaluasi netral secara dini oleh seorang pengacara yang ditunjuk pengadilan dan dianggap netral serta berpengalaman. Non litigasi, dapat menggunakan cara-cara yang alternatifnya memungkinkan orang untuk memperoleh yaitu melalui (1). Negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa dan hasilnya diterima oleh para pihak tersebut (Gatot, 2006:1). Negosiasi sebagai suatu seni untuk mencapai kesepakatan dan bukan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari (Fiona Boyle, 2003:273); (2). Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi sering digunakan untuk tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga sulit untuk didefinisikan secara pasti karena dapat diartikan sebagai konsiliasi, rekonsiliasi, konsultasi bahkan

arbitrase (Laurence Boulle, 1996:5); (3). Arbitrase, *is form of adjudication in which the neutral decision maker is not a judge or an official of an administrative agency. There is no single, comprehensive definition or arbitration that accurately describes all arbitration system* (Riskin & Westbrook, 1987:250). Dalam arbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim yang akan berperan. Kondisi ini dimaksudkan untuk menjamin kenetralan dan keahlian yang mereka anggap diperlukan dalam sengketa yang terjadi.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu: (1). Kepentingan (*interest*); (2). Hak-hak (*rights*); (3) status kekuasaan (*power*) [William Ury, et.al., 1993:31]. Faktor-faktor tersebut oleh para pihak yang bersengketa akan selalu diusahakan untuk dipertahankan semaksimal mungkin. Dan hal ini adalah wajar mengingat bahwa semuanya akan bermuara pada pengadilan yang adil oleh arbiter. Maka segala daya upaya dapat dilakukan sepanjang aturan dan etika memungkinkan untuk itu.

ADR berkembang dengan baik di berbagai negara termasuk di Indonesia karena berbagai kebutuhan sbb. (Stephen B. Golberg, 1985:5-7):

1. mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
3. memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;

4. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Terlebih sekarang dengan berkembangnya teknologi informasi (khususnya internet) maka *Online Dispute Resolution (ODR)* menjadi semakin populer karena semakin memberikan kepuasan kepada para pihak sesuai dengan karakternya yaitu *online* berkarakter: cepat, murah serta akurasi dapat dipertanggungjawabkan, keamanan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang langkah-langkah prosedur sesuai standar teknologi. Perkembangan ODR menunjukkan bahwa ODR menjadi alternatif untuk menyelesaikan perselisihan diantara para pihak dengan pertumbuhan perkembangan jumlah kasus yang diselesaikan cukup mencengangkan.

B. Perkembangan Penggunaan Teknologi *Online* untuk ADR

Pengadilan Amerika Serikat dalam kasus *ACLU vs. Reno*, memperingatkan yaitu berkenaan dengan penggunaan teknologi informasi khususnya internet yang sifatnya teknis yaitu diperlukannya pembahasan yang memadai karena menjadi issue hukum yang penting sbb. (<http://www.techlawjournal.com>):

”...in order to apprehend the legal questions at issue in these cases, it is necessary to have a clear understanding of the exponentially growing, worldwide medium that is the internet, which presents unique issues relating to the application of First Amendment jurisprudence and due process requirements to this new and evolving method of communication.”

Secara teknis, jutaan komputer yang tersambung dalam internet akan berpotensi secara cepat, akurat dan terukur untuk berbagai kepentingan

dalam waktu singkat tergantung pada *bandwith* dan kapasitas memory, termasuk di dalamnya untuk transaksi yang bersifat global. Hubungannya sangat kompleks dan rumit namun berjalan dengan biasa. Melalui IP (*Internet Protocol*), skema komunikasi mendefinisikan data, *message* dan *record*, kemudian diteruskan melalui jaringan dan di sepanjang jaringan. IP mempunyai dua aturan dasar yaitu: (1). Setiap komputer harus dapat dijangkau melalui alamat yang berupa angka-angka dalam empat bit yaitu *IP Address* dan harus ada agar dapat tersambung ke internet; (2). Setiap komputer yang tersambung ke internet harus dapat menerima paket terdiri dari 24 sd. 32 *bytes header* dan satu paket berukuran sd. 576 *bytes*. Untuk memastikan bahwa paket data tersebut sampai ke alamat yang dikehendaki diperlukan protokol lain yaitu *Transmission Control Protocol* (TCP). Oleh karena itu biasa protokol tersebut sebagai TCP/IP dan pengimplementasiannya melalui *stack*. Internet sebagai fungsi utama yaitu (lih. Paustinus, 2004:54):

1. Komunikasi satu orang dengan satu orang lain, seperti e-mail;
2. Komunikasi satu orang dengan banyak penerima pesan seperti *listserv*;
3. Pengiriman *database* dari pesan seperti penggunaan *USENET newsgroups*;
4. Komunikasi realtime seperti penggunaan *Internet Relay Chat*;
5. Pencarian informasi melalui *remote* (seperti *ftp*, *gopher*, dan *World Wide Web*).

Metode berkomunikasi ini dapat digunakan untuk segala keperluan dan dapat mengirimkan informasi elektronik (*data*, *messages*, *records*),

program komputer, suara, gambar, *video streaming*, dll. Dengan berpijak teknologi informasi yang sedemikian maju ini maka ADR-pun dapat dilakukan melalui *online* dengan berkarakter sebagai ADR yang cepat, murah dan berkeadilan persis sama dengan karakter asli dari internet yaitu *realtime*, cepat, *borderless* serta *paperless*.

C. Arbitrase Online

Arbitrase online pada umumnya menyangkut tentang keabsahan perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase dan putusan arbitrase melalui sarana *online*. Apabila semuanya memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan maka semuanya berjalan dengan sah menurut hukum. Persyaratan mengenai bentuk, pengaturan yang relevan menyangkut *arbitrase online* adalah Art. II (1), Art II (2), IV (1), Konvensi New York :

Art. II (1):

"Each Contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration."

Art. II (2):

"The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams."

Art. IV (1):

"To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding Article, the party applying for

recognition and enforcement shall, at the time of the

notification submit:

(a). ...

(b). The original agreement referred to in Article II or a duly certified copy thereof.

Ketentuan-ketentuan Konvensi New York tersebut di atas menunjukkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu bahwa persyaratan perjanjian arbitrase adalah tertulis, ditandatangani dan asli. Antara Art. IV dan Art. II nampak kesan bertentangan namun sebenarnya saling melengkapi yaitu jika perjanjian arbitrase terdapat dalam pertukaran surat dan telegram, tidak ada kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan (Art. II [2]). Kekurangan adanya tanda tangan mengakibatkan permasalahan yaitu originalitas dari perjanjian seperti yang diwajibkan dalam Art. IV.

Transaksi *online* mempunyai kunci permasalahan yang terletak pada persoalan perjanjian yang tertulis, ditanda-tangani dan origin. Kondisi ini diperlukan interpretasi hukum terhadap Konvensi New York yang diterbitkan pada tahun 1958, yaitu sehubungan dengan masalah perjanjian tertulis, tanda tangan dan originalitas akta/dokumen.

Tiga solusi diajukan untuk menyamakan persepsi menyangkut persyaratan tertulis antara Art II (1) dan (2) serta Konvensi New York dengan Art 7 (2) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*:

1. art. II (1) dan (2) KNY diamandemen, namun terdapat kekhawatiran bahwa amandemen tidak mudah dilaksanakan karena harus menghadirkan suatu diskusi berkepanjangan yang berdampak pada ketentuan-ketentuan yang lain;

2. dibuat suatu pernyataan menyangkut penafsiran terhadap Art. II (1) dan (2) KNY yaitu membuat suatu protokol formal terhadap KNY dan atau dibuat suatu konvensi baru yang terpisah untuk mengatasi masalah persyaratan perjanjian arbitrase secara tertulis yang muncul karena perkembangan teknologi informasi.
3. arbitrase diatur oleh hukum nasional masing-masing negara, sehingga pada akhirnya solusi yang ketiga adalah hukum nasional masing-masing negara mencantumkan perjanjian arbitrase online untuk menghindari pertentangan pendapat perjanjian arbitrase tertulis. Permasalahan sebenarnya terletak pada bagaimana menggunakan argumentasi hukum melalui penafsiran hukum untuk memberikan pengertian perjanjian tertulis, bertanda-tangan dan orginal.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Keaslian Penelitian

Buku tentang *Arbitrase Online* pernah ditulis oleh Paustinus Siburian, berjudul "Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)" Tahun 2004, sebagai pengembangan dari thesis yang disusunnya. Namun, tulisan ini menitik beratkan pada arbitrase *online* pada umumnya, alat analisisnya yaitu Konvensi New York dengan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* yang tidak secara spesifik menganalisis tentang korelasi antara Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan arbitrase *online*. Dalam penelitian yang berjudul : Problematika Hukum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perkembangan Arbitrase *Online*, menganalisis secara komprehensif perkembangan arbitrase *online* dan problematika hukum bagi UU No. 30 Tahun 1999 untuk mengikuti perkembangannya. Implikasi-implikasi serta urgensi reinterpretasi beberapa Pasal dalam UU No. 30 Tahun 1999 untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan arbitrase *online*, menjadi fokus utama. Isu-isu hukum yang muncul adalah masalah yurisdiksi, obyek arbitrase *online* penggunaan *virtual juries*, *hybrid processes*, design arbitrase *online* dalam UU No. 30 Tahun 1999 tersebut yaitu apakah dapat menyelesaikannya. Berbagai kasus telah terjadi di Indonesia yang

mendorong untuk dilakukannya reinterpretasi berbagai Pasal dalam UU itu.

Berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 pada saat itu seharusnya dapat mengantisipasi perkembangan arbitrase *online* karena pada saat diundangkannya juga sedang berkembang penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*. Kondisi ini menurut Myrdal, menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara *soft state* yang cenderung menciptakan undang-undang yang cacat (Myrdal, 1970, 219-220). Hal ini jelas terlihat dengan undang-undang yang tidak ditujukan untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Oleh karena itu UU No. 30 Tahun 1999 terbuka kesempatan untuk dianalisis dari sisi *ius constitutum* yang meliputi analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum (Arief Sidharta, 1999:h.122), dalam hal ini antisipasi terhadap arbitrase *online*.

B. Tujuan Penelitian

1. Memberikan rekomendasi yang kritis terhadap UU No. 30 Tahun 1999 sehubungan dengan berkembangnya arbitrase *online*. Perkembangan transaksi-transaksi *online* menunjukkan bahwa forum penyelesaian sengketa online melalui arbitrase sangat disukai para pebisnis karena cepat, memuaskan para pihak dan biaya yang relatif ringan.
2. Mengevaluasi secara kritis tentang hambatan-hambatan implementasi dan urgensi forum penyelesaian sengketa para pihak sehingga perlindungan hukum atas hak-hak para pihak yang bersengketa secara maksimal dapat dilakukan karena transaksi-transaksi *online* cukup

riskan terhadap penipuan, penggelapan, ingkar janji dan bentuk-bentuk pelanggaran hukum lainnya.

C. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang bermanfaat bagi perbaikan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasca berkembangnya arbitrase *online* berkenaan dengan semakin meningkatnya klausula-klausula arbitrase *online* sebagai choice of forum para pihak yang melakukan transaksi-transaksi *online* maupun *offline*. Kecenderungan terjadinya konflik-konflik transaksi-transaksi *online* melalui E-com semakin meningkat karena tidak memadainya perlindungan hukum dan lemahnya perangkat hukum yang menyelesaikan konflik-konflik *online* khususnya di Indonesia diantara para pihak. Padahal, transaksi melalui E-com dimaksudkan untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi seperti halnya pada transaksi konvensional misalnya masalah kecepatan negosiasi, proses pelaksanaan kontrak, levering barang sehingga terjadi suatu akselerasi dalam penyelesaian pelaksanaan kontrak.

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan adalah untuk memberikan keluasan wawasan dan pendalaman pemahaman tentang perkembangan arbitrase *online* dan bagaimana Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 seharusnya meng-cover perkembangan tersebut. Maka, perbaikan-perbaikan terhadap undang-undang tersebut mutlak diperlukan untuk mengantisipasi dan fungsi fasilitatif suatu peraturan dalam perkembangan bisnis *online* melalui E-com pada khususnya atau

Electronic Business pada umumnya. Hukum Indonesia sangat ketinggalan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga (seperti misalnya: Singapura, Malaysia, Philipina) khususnya dalam mengantisipasi perkembangan transaksi-transaksi *online* ini.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis asas-asas hukum yang menjadi dasar bagi sahnya dan berkembangnya arbitrase *online* khususnya berkenaan dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan menekankan pada dogmatik hukum dan teori hukum. Dogmatik hukum menggunakan metode normatif, sedangkan teori hukum menggunakan metode normatif pula dengan sedikit disinggung tentang kondisi dalam praktek.

Fungsi dogmatik hukum digunakan untuk diskripsi, sistematisasi dan sinkronisasi terhadap aturan hukum yang berhubungan dengan pengaturan arbitrase khususnya arbitrase *online* yang difokuskan pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bahan-bahan hukum yang sama dari negara-negara yang menjadi negara pembanding yaitu AS dan Singapura untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukumnya.

Teori hukum digunakan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin-doktrin serta asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk menciptakan pengaturan arbitrase *online* yang globalistik sehingga diperlukannya harmonisasi dan unifikasi hukum. Oleh karena arbitrase *online* mempunyai sifat yang *boderless* dan *paperless* maka bantuan teori hukum sebagai ilmu eksplanasi yang berkarakter

interdisipliner sehingga digunakan disiplin ilmu teknik informatika untuk eksplanasi hukum.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis UU No. 30 Tahun 1999 serta peraturan yang terkait sehingga memungkinkan keabsahan arbitrase *online* dikaitkan dengan Konvensi New York tentang Arbitrase. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu apakah dapat digunakan untuk arbitrase *online* yang mempunyai spesifikasi-spesifikasi tertentu sehingga diharapkan tidak terjadi ambiguitas dan tercipta aturan yang memfasilitasi arbitrase *online*. Sedangkan pendekatan komparatif dimaksudkan untuk mendalami bagaimana dengan pengalaman negara lain mengantisipasi perkembangan arbitrase *online*.

C. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasar hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta bahan hukum asing sebagai bahan pembandingan sehingga ditemukan kecenderungan variasi penggunaan arbitrase *online* yang membantu untuk pertimbangan hukum yang bersifat *ius constituendum*.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari *texbooks*, jurnal-jurnal ilmiah baik dalam negeri maupun luar negeri, pendapat-pendapat para ahli hukum/doktrin, jurisprudensi dan atau kasus-kasus hukum, hasil-hasil penelitian ilmiah atau pertemuan-pertemuan ilmiah para ahli hukum terkait dengan pembahasan arbitrase *online* dan arbitrase pada umumnya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh sebagai petunjuk atau penjelasan yang cukup bermakna terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, misalnya seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedi, manual-manual, model-model hukum, dan lain-lain.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dikumpulkan, disistematisir, diklasifikasikan dengan sistem kartu dan atau juga menggunakan sistem bola salju kemudian dikaji secara komprehensif sehingga diharapkan mendapatkan suatu pemahaman (*verstehen*) dan pemecahan atas isu-isu hukum di bidang teknologi internet karena kompleksitas masalah hukum yang ada dalam perkembangan arbitrase online.

E. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan-perundangan, *lex mercatoria*, *lex informatica*, studi kepustakaan, diuraikan, dihubungkan sehingga membentuk pemahaman dan pendalaman dalam alur logika hukum. Pengolahan bahan hukum dengan menggunakan metode logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari situasi permasalahan yang

bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat konkrit. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola kecenderungan arbitrase *online* dibandingkan dengan arbitrase *offline* tersebut sehingga perlindungan hukum arbitrase *online* mendapatkan akurasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam enam bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok-pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab I (Pendahuluan) berisi uraian latar belakang masalah munculnya problematika hukum implementasi UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sehubungan dengan berkembangnya arbitrase online sebagai akibat bertumbuhnya transaksi-transaksi online. Selanjutnya ditentukan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan ruang lingkup pembahasannya.

Bab II menguraikan kajian pustaka tentang arbitrase pada umumnya dan alternatif penyelesaian sengketa sampai dengan berkembangnya penggunaan teknologi online untuk dimanfaatkan dalam keperluannya sebagai alat penyelesaian sengketa sehingga berkembang dan menemukan bentuknya cara penyelesaian sengketa yaitu arbitrase online. Ditegaskan bahwa arbitrase online menemukan masalah karena sifatnya yang *borderless* dan *paperless* sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi, keamanan, reliabilitas, admisibilitas proses

beracaranya harus mendapatkan jaminan hukum sehingga searah dengan pengaturan hukum yang sudah ada.

Bab III menguraikan tentang jaminan keaslian penelitian bahwa penelitian ini adalah murni hasil karya sendiri tanpa plagiat, pengutipan dilakukan dengan menunjuk sumber yang jelas, penekanan penelitian yang jelas, tujuan penelitian dilakukan yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan memecahkan permasalahan arbitrase online yang berdasarkan pada UU No. 30 Tahun 1999, serta kontribusi penelitian adalah untuk penyempurnaan atau revisi peraturan perundangan yang berlaku.

Bab IV tentang metode penelitian yang kualifikasinya sebagai yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *comparative approach* dan *conceptual approach*. Semua bahan-bahan hukum dianalisis dengan metode logika deduktif. Karena bersangkutan dengan teknologi informatika maka penelitian ini juga interdisipliner dalam analisisnya.

Bab V merupakan analisis terhadap permasalahan yang diteliti yaitu dengan pendekatan *statute approach* UU No.30 Tahun 1999 dianalisis untuk menunjukkan interpretasi hukum yang dapat dilakukan berkenaan dengan berkembangnya arbitrase online, perbandingannya dengan negara AS dan Singapura, serta perkembangan internasional yang merupakan kecenderungan harmonisasi dan unifikasi hukum sehubungan dengan lembaga-lembaga yang menangani arbitrase online; Analisis permasalahan yurisdiksi dan keamanan, reliabilitas, admisibilitas arbitrase online.

Akhirnya, dalam Bab VI dikemukakan rangkuman dari penelitian dan analisis bab-bab terdahulu dapat suatu kesimpulan mengenai perlunya revisi UU No. 30 Tahun 1999 di Indonesia dengan mengikiti perkembangan internasional atau global dibidang arbitrase online. Saran yang disampaikan merupakan bentuk sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengisi kekosongan hukum atau kekurangan hukum terhadap peraturan perundangan yang berlaku melalui interpretasi hukum atau bentuk-bentuk revisi yang diperlukan.

BAB V

ANALISIS PENELITIAN

A. Perkembangan Arbitrase *Offline* dan *Online*

A.1. Arbitrase *Offline*

Arbitrase pada umumnya, setelah berkembang arbitrase online, dibagi menjadi dua yaitu arbitrase offline dan arbitrase online. Arbitrase offline, menurut Lucille M. Ponte & Thomas D. Cavenagh (2004: 82) adalah:

“...is a private adjudicatory method that tends to be the most formal method of ADR with strong roots in traditional litigations. Arbitration is an adversarial process in which each party, usually through its attorney, makes a formal presentation of written and oral evidence to one or more neutral decision-makers in a confidential procedure. Arbitration has been widely embraced as a dispute resolution mechanism in a number of business areas, including construction, financial services, credit card, labor and employment and consumer disputes. The use of arbitration is also quite common in handling international commercial conflict that may make this process well suited for cross-border e-commerce conflicts.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa arbitrase *offline* adalah arbitrase pada umumnya yang sifatnya domestik, dan menjadi salah satu alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Maka, arbitrase online adalah merupakan arbitrase yang menggunakan sarana teknologi *online* sbb:

“...online arbitration allows a third party neutral to render a decision for disputing parties using online technologies to support the process. Many online arbitration services also provide sample clauses for online users to insert into their online agreement or web site terms and conditions. Online arbitration

borrows some of the general characteristics of offline arbitration...”

Pertumbuhan sengketa internasional/global telah mendorong berkembangnya arbitrase sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Pertumbuhan ini terjadi karena bisnis global menghendaki adanya kecepatan, kepraktisan, keadilan dan efisiensi-efektivitas aktivitas yang bermuara pada suatu kepastian hukum. Padahal, litigasi telah gagal menjadi sarana penyelesaian konflik bisnis, karena waktu yang dibutuhkan sangat lama. Di AS, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus litigasi, rata-rata adalah 6 (enam) tahun untuk pengadilan tingkat pertama, dan 3 (tiga) sd. 4 (empat) tahun untuk pengadilan tingkat banding dan kasasi, dengan biaya yang tidak sedikit sehingga samasekali tidak efisien dan efektif untuk mendapatkan kepastian hukum. Apabila dibandingkan dengan perkembangan bisnis, waktu sungguh sangat menentukan dalam memupuk keuntungan. Praktek bisnis membuktikan bahwa kualitas dan kuantitas dapat dikejar dengan teknologi dan manajemen namun ketertinggalan waktu sungguh sangat sulit untuk dikejar sehingga akselerasi yang sejajar dengan masalah waktu mempunyai keterbatasan yang tidak mungkin ditambah kapasitasnya. Oleh karena itu, perkembangan bisnis tersebut memacu berkembangnya alternative dispute resolution sebagai sarana efektif dan efisien untuk menyelesaikan konflik bisnis. Dalam hubungan perdagangan internasional, arbitrase telah menjadi sarana yang umum digunakan dalam menyelesaikan konflik. Setelah berkembangnya E-com, ADR telah berkembang menjadi *Online Dispute Resolution* (ODR) karena sarana

untuk penyelesaian tersebut tersedia yaitu *online* dengan teknologi yang semakin baik.

Kompleksitas masalah terjadi setelah berkembangnya arbitrase *online* mengingat internet adalah ruang yang tidak terbatas dengan tidak ada jaminan bahwa paket data, *messages*, *records*, yang oleh IP (*Internet Protocol*) dipecah-pecah menjadi paket-paket yang terpisah dan dikirim dari komputer ke komputer dapat sampai tujuan dengan aman. Sering terjadi, bahwa para hacker maupun *cracker* “bermain” dengan melakukan tindakan pelanggaran dengan membajak, mengadopsi, memutilasi, meng-*copy*, mencuri, memplagiat semua data, *messages*, *records* untuk kepentingannya. Metode komunikasi yang dapat digunakan untuk transaksi online pada dasarnya dapat menggunakan :

1. Komunikasi satu orang dengan satu orang lain, seperti *e-mail*;
2. Komunikasi satu orang dengan banyak penerima pesan seperti *listserv*;
3. Pengiriman *database* dari pesan seperti menggunakan *USENET newsgroups*;
4. Komunikasi realtime seperti penggunaan *Internet Relay Chat*;
5. Pencarian informasi melalui remote (seperti *ftp*, *gopher*, dan *World Wide Web*)

Kerentanan penggunaan internet seperti tersebut di atas, menumbuhkan persoalan yang mengarah kepada konflik. Oleh karena itu telah berkembang pula institusi yang menangani. Suatu sengketa internasional terlebih global dengan berkembangnya internet, harus memenuhi beberapa unsure yaitu (1). Adanya fakta hukum yang berarti bahwa telah

terjadi adanya hukum yang dilanggar, setidaknya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat melalui kontrak sebagai realisasi *pacta sunt servanda*; (2). Norma hukum para pihak yang dipilih melalui *choice of law*. Transaksi *online* yang tentunya telah mengubah secara revolusioner hubungan hukum para pihak, juga akan sedikit banyak mengubah norma-norma hukum yang diberlakukan, sehingga melalui *choice of law*, norma hukum yang diberlakukan menjadi jelas karena *lex informatica* sedang menemukan bentuknya sehingga masih menimbulkan beberapa masalah dalam praktek; (3). Institusi yang ditunjuk oleh para pihak dalam penyelesaian perkara. Institusi ini tentu saja harus memenuhi kriteria yaitu internasional menurut organisasinya, struktur dan atau prosedurnya serta fakta hukum yang terjadi.

Beberapa lembaga arbitrase internasional yang lazim digunakan para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa internasional diantaranya adalah sbb:

1. *Dispute Settlement Body by WTO*, sebagai institusi penyelesai sengketa antar Negara anggota WTO;
2. *The International Chamber of Commerce (ICC)*;
3. *International Center for Settlement of Investment Dispute* (yang berafiliasi pada Bank Dunia);
4. *United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL)*;
5. *World Intellectual Property Organization (WIPO) Arbitration and Mediation Center*;
6. *The American Arbitration Association (AAA)*;
7. *Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce*;

8. *Euro Arab Chamber of Commerce*
9. *The Inter-American Commercial Arbitration Commission*
10. *The London Court of Arbitration Decision are Enforceable Under English Law and English Court;*
11. *The Canadian-American Commercial Arbitration Commission for Dispute Between Canadian and US Business;*
12. *Seed and Fat Association, Grain and Corn Trade Association;*
13. *London Commodity Exchange;*
14. *The London Court of Administrative;*
15. *The Netherlands Coffee Trade Association di Amsterdam*

Lembaga-lembaga arbitrase internasional tersebut dimaksudkan sebagai pilihan forum (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya tunduk pada *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau dikenal sebagai *New York Convention 1958* dan *Washington Convention 1965 (Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States)*. Seperti halnya Indonesia maka setiap putusan arbitrase asing, setiap Negara anggota wajib menaati putusan konvensi tersebut seperti tertuang dalam Art. 1 sbb:

“1. This convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought.”

Dalam arbitrase *offline* seperti ini maka para pihak sebagai pebisnis dalam menyelesaikan sengketa memperoleh kebebasan dalam memilih wasit/arbitrer yang adil dan tidak memihak, serta putusannya akan ditaati dan mengikat para pihak sebagai *final and binding*. Oleh karena itu kelebihan arbitrase bila dibandingkan dengan litigasi adalah sbb:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
3. Para pihak dapat memilih arbitrer yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. Pemilihan arbitrer sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrer yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli hukum, tetapi juga dapat merupakan ahli dibidang lain, seperti misalnya ahli asuransi, perbankan, konstruksi, dan lain-lain tergantung kasus posisinya;¹
4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
5. Putusan arbitrer merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan;

¹Dalam praktik, dewan arbitrase yang menangani kasus, peranan ahli hukum tetap harus ada dalam komposisi dewan. Misalnya, dalam kasus terkenal GATT, yaitu the DISC, Panel GATT yang mengadili kasus ini terdiri dari dua orang ahli ekonomi dan seorang ahli hukum. Peranan ahli hukum pada dasarnya signifikan dalam proses beracara, penentuan hak dan kewajiban para pihak dan penentuan prinsip-prinsip hukum dalam suatu sengketa.

6. Para arbiter dapat dimungkinkan untuk memutuskan dalam sengketanya dengan mendasarkan diri pada kelayakan dan kepatutan dengan catatan dikehendaki para pihak. (Hans Bagnier, 1983:173).

7. Putusan arbitrase internasional relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain anggota Konvensi New York dan Konvensi Washington bila dibandingkan dengan apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi. Jaminan dari pelaksanaan putusan arbitrase ini adalah bahwa dalam Konvensi New York diatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.²

Pebisnis asing tentunya akan berusaha menggiring dalam negosiasi kontrak internasionalnya dengan pebisnis Indonesia karena beberapa alasan sbb:

1. Adanya kekhawatiran pihak pebisnis asing terhadap sistem hukum dan para hakim di negara-negara berkembang terlebih negara Indonesia karena profesionalitas hakim yang relatif rendah serta sistem hukum yang cenderung tidak tertata dengan baik dan banyaknya peraturan hukum yang standarnya di bawah standar internasional dan banyak kekurangannya.
2. Prinsip *Most Favoured Nation* dikhawatirkan akan tidak berlaku di negara-negara berkembang karena hakim cenderung untuk melindungi warganya sendiri.
3. *Bargaining position*, baik secara individu maupun kolektif, bagi negara berkembang rendah karena mereka membutuhkan dana

²Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 dengan Keppres No. 54 Tahun 1981.

sehingga hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh negara-negara maju untuk mendiktekan kehendaknya.

A.2. Arbitrase Online

Arbitrase dengan menggunakan sarana teknologi *online* oleh Lucille Ponte disebut sebagai arbitrase *online*. Arbitrase *online* sendiri muncul sebagai hasil kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui kontrak online yang biasanya dilakukan melalui *clickwrap agreement* ataupun *browsewrap agreement*. Contoh kedua kontrak *online* tersebut adalah sbb: (Cheeseman, 1988:247)

"In a click-wrap agreement the online purchaser agrees to the terms of the contract by clicking on an icon at the end of the terms. The icon is usually labeled something like "I accept" or "I agree" or "I wish to continue." The purchaser can complete the transaction."

"In a browse wrap agreement the online purchaser agrees to the terms of the contract by browsing the Website. The terms are usually included on a link titled something like "Terms," "Terms and Conditions" or "Conditions of service." The purchaser is not required to click on the link before completing the purchase."

Browsewrap dan *clickwrap* adalah dua cara yang berbeda, yaitu bahwa dalam *browsewrap*, *user* tidak diwajibkan untuk mengklik apapun sebelum melengkapi transaksinya. *Buyer* atau *user online* apabila menyetujui persyaratan kontrak bisa dengan melihat isi dari *situs seller*. Dengan melihat situs tersebut, *buyer* tinggal mengikuti petunjuk dalam manual yang tersedia sesuai kepentingan yang dikehendaki. Klausula

yang tersedia adalah klausula standar, Klausula penyelesaian sengketa juga tersedia dengan diarahkan pada pola ODR.

ODR mempunyai karakteristik yaitu *boderless* karena tidak dibatasi oleh suatu kesatuan geografi tertentu. Pembatasan pada geografi tertentu dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu. Diseluruh dunia terdapat kurang lebih 20 dari 49 institusi yang menjadi penyedia jasa penyelesaian konflik *online* khususnya arbitrase *online*. Sebagai salah satu contoh adalah yang dilakukan *WIPO Mediation and Arbitration Center*, secara efektif digunakan oleh para pelaku teknologi informasi yang menggunakan domain name yang registrasinya dilakukan di lembaga ICANN.³ *WIPO Mediation and Arbitration Center* menggunakan *UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)* sebagai hukum substantif serta prosedur penyelesaiannya. *UDRP* sebagai hukum substansi dan ajektif dalam perkembangan sangat efisien dalam membuat panel dengan putusan yang cukup berwibawa karena secara teknis putusan panel dapat segera dijalankan melalui Registrar nama domain yang mendaftarkan nama domain yang dipersengketakan.

UDRP merupakan kaidah substantif dan ajektif yang sangat relevan digunakan oleh berbagai pihak dalam menangani masalah sengketa kepemilikan nama domain dalam bentuk pengadilan siber (*cyber court*). *UDRP* diprakarsai oleh ICANN yang merupakan satu-satunya lembaga di dunia yang mengatur *traffic* pembuatan nama

³ICANN adalah Internet Corporation for Assigned Names and Numbers yang merupakan institusi nirlaba yang berkedudukan di AS yang mempunyai peranan utama yaitu sebagai institusi yang mengatur lalu lintas pembuatan nama di seluruh dunia. Sekarang terdapat 100 buah institusi yang merupakan kepanjangan tangan dari ICANN untuk melakukan registrasi.

domain dan berlaku efektif sejak 26 Agustus 1999. Sejak awal UDRP telah dilakukan oleh seluruh registrar nama domain yang berakhiran .com, .net, dan .org, selain nama domain yang termasuk ke dalam kategori country code top- level domains seperti .nu, .tv, .ws dan lain-lain.

UDRP digunakan sebagai klausul pilihan hukum dan pilihan forum yang sejajar dengan Hukum Perdata Internasional dalam pendaftaran nama domain antara para pihak registrar dan pemegang nama domain, yang mengatur berbagai ketentuan pokok dan tata cara penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang diakibatkan oleh penggunaan nama domain tersebut. Persyaratan untuk pendaftar nama domain antara lain ialah bahwa pembuatan suatu nama domain tidak boleh melanggar hak dan kepentingan pihak ketiga, larangan membuat nama domain untuk kepentingan tujuan tidak baik, tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum konvensional yang berlaku dan pemegang nama domain bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala akibat pelanggaran yang terjadi terhadap pihak ketiga atas pendaftaran nama domain yang dilakukannya.⁴

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UDRP, pihak registrar berhak untuk membatalkan, memindahkan maupun mengubah nama domain yang telah didaftarkan oleh pihak pemegang nama domain, antara lain atas adanya putusan atau perintah dari lembaga pengadilan maupun forum arbitrase yang berwenang atau Putusan Panel.

⁴Lihat Paragraf 2 UDRP.

Norma-norma yang digunakan sebagai dasar putusan pelanggaran nama domain oleh Panel adalah berdasarkan Paragraf 4 (a) UDRP adalah sbb:

1. Nama domain tersebut sama atau memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek terdaftar atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga;
2. Pihak pemegang nama domain tidak mempunyai kepentingan maupun hak atas penggunaan nama domain tersebut;
3. Nama domain yang didaftarkan telah digunakan dengan itikad buruk. Dalam proses penyelesaian secara administratif, pihak penggugat harus dapat membuktikan seluruh butir pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang nama domain dari tiga ketentuan tersebut.

Suatu nama domain, menurut Paragraf 4 (b) UDRP, dianggap telah didaftarkan dengan itikad buruk apabila memenuhi beberapa hal sbb:

1. Pemegang nama domain mendaftarkan mendaftarkan nama domain dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan ataupun memindahkan nama domain tersebut kepada pihak penggugat selaku pemilik hak atas merek terdaftar tersebut, maupun menjualnya kepada pesaing dari pihak penggugat dengan sejumlah imbalan tertentu.
2. Pihak pemegang nama domain dengan sengaja telah mendaftarkan suatu nama domain agar pihak penggugat, selaku pemilik hak atas merek nama domain tersebut, tidak

dapat membuat nama domain sesuai dengan merek yang dimilikinya.

3. Pihak pemegang nama domain telah mendaftarkan suatu nama domain dengan tujuan untuk mengganggu jalannya persaingan bisnis pihak ketiga.
4. Pihak pemegang nama domain secara sengaja telah berusaha untuk menarik perhatian khalayak dalam mencari keuntungan dari merek nama domain yang telah didaftarkannya dengan cara membuat bingung para pengguna internet, selaku konsumen dari merek tersebut.

Proses penyidangan panel atas pelanggaran nama domain, hak pihak penggugat hanya terbatas pada proses pembatalan nama domain maupun pemindahan nama domain dari pihak pemegang nama domain kepada pihak ketiga. Berdasarkan Putusan Panel, provider akan memberitahukan segala hasil putusan yang telah dikeluarkan oleh Panel kepada pihak registrar yang kemudian selanjutnya akan dipublikasikan ke seluruh jaringan internet. Disamping itu, penyelesaian melalui mekanisme UDRP tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan yang berwenang, misalnya jika materi gugatan menyangkut masalah ganti rugi. Apabila panel telah memutuskan pembatalan atau pemindahan nama domain kepada pihak penggugat, maka pihak registrar harus menunggu selama 10 hari untuk proses pemberitahuan apabila terjadi suatu kesalahan prosedur maupun kesalahan penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa oleh Panel.

Kasus Audiopoint.com vs. eCorp.Inc. menjadi terkenal dengan kasus posisi bahwa Audiopoint. Inc memonitor melalui internet nama domain <audiopoint.com> pada tanggal 6 Februari 1999, dan nama domain dimaksud masih belum dimiliki seseorang. Namun, ketika pihak Audiopoint.com akan mendaftarkan nama domain <audiopoint.com> pada tanggal 9 Februari 1999, nama domain yang bersangkutan telah didaftarkan oleh eCorp.Inc, yaitu suatu perusahaan komunikasi jaringan global yang didirikan pada tahun 1996, yang menjalankan bisnis nama domain berbasis jaringan global. Ternyata eCorp.Inc., telah mendaftarkan nama domain <audiopoint.com> pada tanggal 8 Februari 1999 melalui Registrar Tocows.com.

Audiopoint, Inc menggugat eCorp, Inc. melalui WIPO Arbitration and Mediation Center melalui e-mail pada tanggal 6 April 2001 dan versi hard copy-nya diterima pada tanggal 10 April 2001. Panel, berdasarkan ketentuan paragraph 4 (a) UDRP, menolak gugatan penggugat untuk mentransfer nama domain tergugat kepada penggugat.

Kasus nama domain lain yang dapat menjadi perbandingan adalah kasus TSTV.com. Penggugat adalah Toroto Star Newspaper Ltd. Sebuah perusahaan Kanada yang bergerak di bidang produser program-program televisi. Penggugat merupakan pemilik sah atas merek "TSTV" dengan nomor pendaftaran TMA 496,452 yang didaftarkan pada tanggal 16 Juni 1998 untuk digunakan dalam nama produk atas barang-barang dan jasa-jasa. Penggugat telah menggunakan merek dagang "TSTV" di Kanada sejak tanggal 26 Mei 1998. Penggugat memiliki nama domain tstv.ca, yang didaftarkan di registrar Kanada pada tanggal 27 April 2000.

Penggugat juga memiliki nama domain **torontostartv.com**, yang didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 1998. Penggugat telah mengoperasikan TSTV sejak 26 Mei 1998 yang didistribusikan melalui TV kabel di Ontario, Kanada. Sejak April 2000 TSTV telah dapat diakses secara global melalui internet dengan nama domain **tstv.ca** dan **torontostartv.com**. Pada tanggal 22 September 1998, pihak tergugat yang memiliki usaha terkait dengan koleksi nama domain, telah mendaftarkan **tstv.com** sebagai nama domain di registrar Network Solution, Inc. (NSI). Penggugat menganggap bahwa nama domain yang didaftarkan Tergugat dapat membingungkan dan melanggar merek milik Penggugat.

Penggugat mengajukan gugatan melalui WIPO Arbitration and Mediation Center pada tanggal 23 November 2000 dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 27 Desember 2000, dan memilih penyelesaian sengketa oleh 3 orang Panel. Panel, pada tanggal 5 Februari 2001 memutuskan menolak gugatan dan pengalihan nama domain **tstv.com** karena penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atau kepentingan hukum terhadap nama domain, dan gagalnya argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa nama domain **tstv.com** telah didaftarkan dan digunakan dengan iktikad buruk Tergugat.

Kasus lainnya yang terjadi secara lintas negara juga telah menarik banyak perhatian ahli hukum yaitu kasus **Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. Vs. International Foodstuffs Company**. Kasus nama

domain yang mirip dengan kasus ini juga terjadi dalam perkara *Nokia.com vs. Nokiagirls.com*.

Kasus IFFCO pada tanggal 4 Januari 2002 diputuskan oleh Panel bahwa sengketa ini tidak termasuk dalam lingkup Pasal 4 (a) UDRP mengenai syarat pembatalan, pengubahan atau pengalihan kepemilikan nama domain, dan oleh karena itu gugatan tidak dikabulkan, sehingga nama domain <iffco.com> tetap milik International Foodstuffs Company. Penggunaan nama domain oleh Tergugat juga tidak termasuk ke dalam perbuatan *reverse domain name hijacking* yang diatur dalam Pasal 1 UDRP. Tidak ada bukti-bukti Penggugat beriktikad buruk untuk berusaha meniadakan hak atas nama domain <iffco.com> dari pihak Tergugat. Panel memutuskan menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan *reverse domain name hijacking*.

Berbeda dengan kasus di atas, Panel dalam kasus *Nokiagirl.com* memutuskan melalui WIPO Arbitration and Mediation Center No. D2000-0102 tanggal 18 April 2000, justru mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa nama domain *Nokiagirls.com* yang didaftarkan pihak tergugat sangat mirip dengan merek yang dimiliki oleh Penggugat; dan menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas nama domain *Nokiagirls.com* tersebut. Disamping itu, Panel juga menyatakan Tergugat telah mendaftarkan dan menggunakan *www.nokiagirls.com* dengan iktikad buruk (*bad faith*). Dengan mengacu kepada Paragraf 4 (i) UDRP, Panel memutuskan pendaftaran nama domain *Nokiagirls.com* dibatalkan.

Di Indonesia, kasus klikbca.com, mengemuka sebagai kasus yang berkaitan dengan nama domain. [Klikbca.com](http://klikbca.com) adalah nama domain untuk mengakses hubungan dengan internet banking Bank Central Asia (BCA). Kasus ini terjadi karena seseorang telah membuat nama-nama domain plesetan yaitu: www.klikbca.com, www.clickbca.com, www.klikbac.com dan lain-lain yang dapat menyebabkan nasabah salah dan tersesat melakukan akses. Dalam kasus klikbca.com, tampak bahwa hal-hal yang fatal dapat terjadi hanya karena kesalahan minor dalam pengetikan yang dikenal sebagai *delution*. Pemakaian dan "plesetan" nama domain secara tanpa hak seperti ini samasekali tidak mengurangi hak-hak pemilik merek asli untuk dilindungi sebagai pemilik merek yang sebenarnya, dan pihak yang menggunakan nama domain dengan merek tertentu tersebut samasekali juga tidak mempunyai hak atas merek terdaftar tersebut.

Apabila kasus tersebut di atas diselesaikan dalam forum *WIPO Arbitration and Mediation Center*, dengan berbasiskan pada UDRP, maka keputusan Panel, akan lebih menguntungkan BCA karena *delution* dalam UDRP termasuk dilarang. Sehingga, format *delution* tersebut dapat dihapus dari provider.

WIPO Arbitration and Mediation Center adalah merupakan bentuk penyelesaian sengketa arbitrase yang khusus karena salah satu cirikhas arbitrase yaitu menjaga kerahasiaan dalam berarbitrase tidak terjadi. Putusan Panel *WIPO Arbitration and Mediation Center* dapat dengan mudah diakses melalui website WIPO. Kerahasiaan dilakukan setelah diminta oleh para pihak yang bersengketa.

Beberapa penyedia jasa arbitrase menyediakan jasa untuk segala jenis sengketa di semua lapangan hukum. Penyedia jasa ini adalah 1-2-3 Settle.com, Cyber arbitration, MARS, dan NovaForum.com. Dalam form aplikasi dapat dilihat kasus-kasus yang cukup beragam untuk ditangani. Kasus seperti kasus mobil, pelanggaran kontrak, asuransi, sengketa keluarga, perbankan, dan lain-lain. Disamping itu varian kasus yang ditangani mulai dari sengketa ketenaga-kerjaan sampai dengan aktivitas perdagangan. Dari berbagai penyedia jasa arbitrase tersebut tidak ada satupun yang menyediakan jasa untuk menyelesaikan kasus arbitrase tindak pidana karena bersangkutan dengan kebijakan publik suatu negara. iCourthouse menyediakan jasa khusus sengketa sipil. Kebanyakan dari penyedia jasa arbitrase online adalah mengenai hubungan yang melibatkan para pebisnis dengan konsumen. Hanya beberapa yang menyediakan jasa tertentu yang menyelesaikan sengketa B2C, seperti BBB Online. Terdapat dua institusi yang menyediakan jasa yang menyertakan sengketa dengan badan pemerintah yaitu MARS dan ODR.NL. Juga, ada yang membatasi ruang lingkup jasanya pada program trustmark yaitu WebAssured.com dan World&Bond.

Institusi-institusi yang secara konvensional melayani arbitrase *offline*, juga telah menyelenggarakan arbitrase online, karena institusi tersebut memang telah mempunyai perangkat yang memadai, tinggal penggunaan sarana teknologi internet saja. Penjaminan bahwa perkara yang ditangani dari sisi keamanan, validitas, reliabilitas dan admisibilitas dapat dipertanggungjawabkan maka institusi tersebut akan mendapat kepercayaan yang tinggi seperti halnya *American Arbitration Association*

(AAA), UNCITRAL, ICC, ILC, *Asian Domein Name Disputes Resolution Centre* (ADNDRC), WIPO, VMAG, *Chatered Institute of Arbitrator* (CIA), *NovaForum*.

B. Implementasi UU No. 33 Tahun 1999 dengan Berkembangnya Arbitrase Online

B.1. Perjanjian Arbitrase dan keabsahan perjanjian arbitrase elektronik

Norma hukum yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur dalam Undang Undang No. 33 Tahun 1999 yang menggantikan atau mencabut semua ketentuan tentang arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sd. 651 *Reglement de Rechverordering*, Staatblad 1847 No. 52 dan Pasal 377 *Het Herziene Indonesische Reglement*, Staatblad 1941 No. 44 dan Pasal 705 *Rechreglement Buitengewesten*, Staatsblad 1927:227.

Lahirnya undang-undang baru ini adalah bernuansa politis yaitu eforia reformasi segala bidang di Indonesia. Oleh karena itu, seperti halnya peraturan perundang-undangan yang lahir pada tahun 1997-2000 menunjukkan kondisi Indonesia yang merupakan negara *soft state* sehingga banyak undang-undang dilahirkan tanpa melalui prosedur baku yaitu melalui naskah akademik, dengan kajian yang mendalam serta diarahkan ke masa depan serta perkembangan internasional terutama adanya harmonisasi dan unifikasi hukum yang pada saat itu juga sedang dibicarakan dan dipelajari dengan intensif. Demikian pula dengan UU No.

30 Tahun 1999 ini ternyata terbukti menimbulkan permasalahan dan kontroversi baru bahkan kompleksitas masalah baru dalam tahap implementasinya, terutama di dalam Pasal-pasal yang menyangkut eksekutorial yaitu pengadilan yang menjadi satu-satunya lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu.

Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999, menyebutkan arbitrase sebagai acara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Luas lingkup arbitrase dalam undang-undang ini tidak jelas. Dari 82 Pasal yang ada, hanya menegaskan secara umum dalam Pasal 5 yang disebutkan sbb:

- (1). Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa;
- (2). Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Uraian Pasal 5 di atas ditafsirkan bahwa arbitrase dapat dilakukan untuk sengketa perdagangan, penguasaan sepenuhnya ada pada para pihak yang bersengketa serta terhadap perbuatan tersebut tidak dimungkinkan untuk masuk dalam acara perdamaian lagi. Dalam Pasal 3 (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyempurnakan UU No. 14 Tahun 1970 tidak memerinci perbuatan apa yang tidak diperbolehkan diselesaikan melalui arbitrase. Pasal tersebut hanya mengakui bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih tetap diperkenankan seperti tersebut dalam Penjelasan Pasal itu.

Obyek arbitrase yang cukup sumir tersebut, memberikan peluang terhadap arbitrase *online* untuk mendapatkan pendasarannya di dalam UU No. 30 Tahun 1999. Beberapa penyedia jasa arbitrase online yaitu 1-2-3 Settle.com, Cyber arbitration, MARS, dan NovaForum.com. menyediakan jasa untuk segala jenis sengketa di semua lapangan hukum. Dalam konteks arbitrase online, tidak ada pembatasan jenis sengketa yang dapat diselesaikan, kecuali di lapangan hukum pidana. HMN Purwosucipto menganalisis tentang bidang apa saja yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, dengan melihat sejarah yang dibentuk untuk kepentingan pedagang. Adapun sengketa tersebut dapat berupa penyelesaian mengenai hal-hal yaitu (1). Jual beli perusahaan; (2). Perjanjian perburuhan kerja; (3). Makelar dan komisioner; (4). Perjanjian pengangkutan dan lain-lain. (Purwosucipto, 1983: h.1-2) Analisis Purwosucipto ini dilatar belakangi oleh keahlian yang bersangkutan dibidang hukum dagang/bisnis. Dalam perkembangan arbitrase online, penyelesaian sengketa juga meliputi penyediaan jasa yang menyertakan sengketa dengan badan pemerintah yaitu MARS dan ODR.NL. Juga, ada yang membatasi ruang lingkup jasanya pada program trustmark yaitu WebAssured.com dan World&Bond.

Pertumbuhan pelayanan jasa penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, akhirnya akan bermuara pada kebutuhan dari konsumen atau user. Tidak ada batasan yang rigid tanpa pendasaran argumentasi hukum yang jelas. Dalam konteks hubungan antara produsen dan konsumen jelas terlihat dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun

1999 Pasal 47 tentang Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan adalah sbb:

"Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen"

Rumusan Pasal 47 ini menjangkau obyek yang demikian luas sehingga memberikan peluang penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dengan kriteria yaitu penyelesaian sengketa tersebut tercapai melalui kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau tindakan tertentu (dapat berupa apa saja asal disepakati para pihak atau tergantung pada putusan Panelis).

UU No. 30 Tahun 1999 menggunakan istilah yang rancu dan berbeda-beda yaitu Pasal 1 angka 1⁵ menggunakan istilah bahwa perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis dan Pasal 1 angka 3⁶ menggunakan istilah perjanjian tertulis dan perjanjian arbitrase tersendiri serta Pasal 4 ayat (1) dan (2)⁷ menggunakan istilah dokumen yang ditanda tangani. Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dijadikan dasar untuk arbitrase online karena sifatnya umum yaitu dalam arti bahwa

⁵Pasal 1 angka 1, UU No. 30 Th. 1999: Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁶Pasal 1 angka 3, UU No. 30 Th. 1999: Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

⁷Pasal 4 (1), UU No. 30 Th. 1999: Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. (2). Pertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

baik klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase dengan menggunakan istilah dokumen memberikan petunjuk suatu interpretasi sebagai dokumen tertulis yang berupa elektronik. Paustinus, memberikan penafsiran keliru terhadap Pasal 9 (1) dan (2)⁸ yang menggunakan istilah perjanjian tertulis sebagai berbeda dengan dokumen. Perjanjian tertulis yang ditanda tangani adalah merupakan dokumen juga. Maka dalam suatu perjanjian tertulis harus ditafsirkan meliputi elektronik dan digital juga. Informasi elektronik yang antara lain berupa perjanjian/kontrak elektronik yang merupakan tertulis dalam ujud elektronik.

Berkaitan dengan bukti tertulis (dimana perjanjian/kontrak tertulis merupakan salah satunya), dalam HIR (Rbg) khususnya berkaitan dengan hukum pembuktian yaitu berhubungan dengan alat-alat bukti (Pasal 164 HIR), dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkembang disekitar teknologi informasi dan komunikasi. Dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, sebenarnya bertumpu pada 'bukti tertulis' (*het schriftelijk bewijs*) karena substansinya terletak bagaimana mengkualifisir informasi elektronik sehingga termasuk pengertian bukti tertulis. Beberapa pengarang memberikan pengertian *het schriftelijk bewijs* sebagai bukti surat.⁹ Menurut penulis,

⁸Pasal 9 (1) UU No. 30 Th. 1999: Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries.

⁹Lihat misalnya oleh Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, h.119, R. Tresna, *Op.cit.*, h.141., Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Op.cit.*, h.61., istilah *het schriftelijk bewijs* diartikan sebagai bukti surat.

dengan penerjemahan seperti ini berarti sebenarnya memberikan batasan luas lingkup *schriftelijk bewijs* yang hanya berbasis kertas (*paper based*). Bukti surat (*brief bewijs*) berbeda dengan bukti tertulis (*het schriftelijk bewijs*) karena bukti surat¹⁰ disamping berbasis kertas juga harus ditanda tangani untuk sahnya sebagai bukti surat yang setidaknya tidaknya berkualifikasi sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan bukti tertulis mempunyai makna yang lebih luas karena bukti tertulis berarti segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.¹¹ Pengertian ini bersifat substantif, sehingga pencurahan isi hati atau penyampaian buah pikiran untuk pembuktian dapat menggunakan sarana apapun baik melalui sarana kertas, elektronik, digital, *biometric* dan sarana-sarana lain yang dapat dipergunakan.

“Tulisan”, dari segi yuridis adalah tanda bacaan dalam bentuk aksara dan tanda baca. Aksara bervariasi yaitu dapat berujud aksara Latin seperti yang dikenal umum/internasional, Arab, Cina, Jepang, dan sebagainya ataupun aksara yang bersifat lokal Indonesia, misalnya, aksara Jawa, Batak, Bugis. Bentuk aksara dapat juga berupa stenografi¹², morse yang merupakan aksara sandi menggunakan sarana elektronik maupun manual, misalnya lampu. Berbagai bentuk aksara tersebut diakui dan sah sehingga berfungsi sebagai tanda bacaan yang

¹⁰Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas (kain, dsb) yang tertulis (berbagai-bagai isi maksudnya), h.872.

¹¹Sudikno Mertokusumo IV, *Op.cit.*, h.142 lihat juga hal. 189-190 di muka.

¹²Pitlo, *Op.cit.*, h.51.

berwujud tulisan atau surat maupun akta/dokumen dan tertulis. Ekspresinya berujud kalimat yang tersusun dan mempunyai makna yang merupakan cetusan dari pikiran, perasaan, kehendak orang yang membuatnya sehingga dimengerti oleh orang lain. Tulisan yang tertulis tersebut menggunakan suatu 'bahan' yang variatif sesuai dengan kemajuan jaman. Pada umumnya, tertulis itu di atas kertas, tetapi juga dapat menggunakan sarana lain yaitu daun lontar, kain, bambu, kulit kayu dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, sarana tertulis melalui media elektronik dan digital. Agar mempunyai kekuatan pembuktian maka tulisan tersebut harus ditandatangani oleh yang bersangkutan, sehingga tulisan yang tidak bertandatangan tidak sempurna dan tidak sah sebagai alat bukti.¹³ Beberapa hal tidak dapat dikategorikan sebagai tulisan, misalnya, photo dan peta, karena tidak dapat menjelaskan secara umum tentang hal-hal yang tertera di dalamnya, kecuali apabila photo tersebut mengidentifikasi suatu tulisan tertentu maka photo tersebut secara akurat dapat menjadi bukti hukum. Sebagai bukti hukum, tanggal tulisan menjadi penting disamping tandatangan yang bersangkutan. Untuk tulisan-tulisan yang menggunakan sarana komputer, elektronik dan digital, identifikasi yang berupa waktu pembuatan tulisan secara otomatis dapat dilakukan secara akurat bahkan detail termasuk identifikasi waktu yang menggunakan sarana photo, tergantung program yang digunakan dan diinginkan.

¹³Lihat Pasal 1869 BW jjs. Pasal 1874 BW, Pasal 1 Ordonansi 1867 No.29.

Hasil teknologi informasi yang sekarang sedang menjadi tumpuan relasi antar manusia modern maupun relasi antar perusahaan, biasa disebut sebagai informasi elektronik (termasuk di dalamnya informasi digital, data, *message*, *record*). Informasi elektronik telah membuktikan tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi dengan tingkat keakuratan yang tinggi pula. Dan itu semua tidak hanya dalam hal proses pembuatannya tetapi juga aspek pengolahan dan penyimpanannya. Permasalahan muncul ketika ketentuan hukum konvensional baik perdata maupun pidana menghendaki bentuk-bentuk tertulis setiap informasi, dengan maksud untuk memberikan kekuatan hukum sebagai alat bukti. Walaupun hal itu tidak mutlak (dhi. bentuk tertulis), seperti halnya dalam perjanjian, namun hubungan hukum masa kini, bentuk tertulis jauh lebih aman dalam suatu tatanan hubungan hukum bila dibandingkan dengan fakta hukum yang tidak tertulis. Demikian juga berbagai undang-undang sering dimuat ketentuan yang justru mengharuskan adanya “pemberitahuan tertulis” sebagai persyaratan perjanjian atau sebagai ketentuan administratif yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pihak-pihak lain. Informasi elektronik yang berujud “*e-mail*”, misalnya, apakah cukup kuat untuk menggantikan fungsi “pemberitahuan tertulis”? Sepanjang proses sistem informasi yang digunakan untuk mengirim *e-mail* sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditentukan dan pihak-pihak pengirim *e-mail* jelas *legal identity*-nya maka *e-mail* menjadi alat bukti yang kuat dalam pembuktian. Oleh karena itu maka bukti tertulis yang berbentuk informasi elektronik, dalam hukum Indonesia dapat

dipertanggungjawabkan sebab tingkat reliabilitas keamanan dengan menggunakan informasi elektronik adalah sama dengan menggunakan dokumen kertas bahkan lebih baik karena pengaplikasian sistem *electronic commerce* yang sarat pengetahuan itu berarti terdapat validitas substansi informasi dalam proses pengolahan informasi yang ditentukan oleh identitas hukum para pihak yang sah dan jelas. Semua transaksi elektronik yang bertumpu pada informasi elektronik dapat diidentifikasi keabsahannya karena konsep kunci atau inti dari admisibilitas bukti dan nilai pembuktian dari informasi elektronik, yang merupakan sentral hukum pembuktian, masih tetap sama yaitu adanya cara-cara untuk membuktikan bahwa informasi elektronik yang dikirim dan yang diterima, relatif tidak dapat diubah dalam proses pengiriman dan penerimaan, tidak dapat dibaca dan diinterpretasikan oleh pihak ketiga manapun. Dalam RUU ITE, Bab II Pasal 3 dengan tegas menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, hati-hati, iktikad baik, dan netral teknologi. Terhadap asas-asas tersebut dalam Penjelasan Pasal 3, RUU ITE, diuraikan sbb:¹⁴

- “a. Asas kepastian hukum berarti memberikan suatu landasan hukum sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- a. Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

¹⁴Lihat Penjelasan Pasal 3, RUU ITE

- b. Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- c. Asas iktikad baik berarti para pihak yang bertransaksi tidak bertujuan untuk secara sengaja mengakibatkan kerugian kepada pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;
- d. Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang.”

Asas kepastian hukum, asas hati-hati dan asas iktikad baik dalam informasi elektronik sangat penting karena berhubungan dengan konsep kunci atau inti dari admisibilitas bukti dan nilai kebuktian dari informasi elektronik, yang merupakan sentral hukum pembuktian dalam penjaminan kepastian hukum.

Perjanjian arbitrase dalam kontrak arbitrase online untuk keberlakuannya mendasarkan diri pada Konvensi New York yang diratifikasi Indonesia dan UU No. 30 Tahun 1999. Menurut Art. II (2)¹⁵ Konvensi New York, mengakui bahwa jika perjanjian arbitrase terdapat dalam pertukaran surat dan telegram, tidak ada kewajiban untuk membubuhkan tanda tangan. Maka perjanjian arbitrase yang dikirimkan melalui fax, e-mail, kontrak online lainnya akan dipertimbangkan sebagai suatu perjanjian yang asli.¹⁶ Pendapat ini bertentangan dengan analisis Paustinus yang menyatakan bahwa penafsiran perjanjian melalui

¹⁵Art. II (2) Konvensi New York: “The term ‘agreement in writing’ shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.”

¹⁶ Lihat analisis sebelumnya.

fax, e-mail, perjanjian online tidak memenuhi persyaratan sebagai perjanjian yang asli dengan berdasarkan disamping Art. II juga Art IV¹⁷ Konvensi New York yang mengharuskan adanya tanda tangan sebagai sahnya suatu perjanjian arbitrase. Paustinus lupa bahwa dalam tukar menukar dokumen elektronik, masalah keamanan, validitas dan admisibilitas informasi elektronik dapat dijaga dan sah menurut hukum melalui tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital, melalui penafsiran pengertian tertulis dan profil tanda tangan.

B.2. Prosedur Arbitrase online

Konvensi New York menyebutkan tiga alasan untuk menolak suatu pengakuan dan suatu pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional menyangkut prosedur berarbitrase yaitu (1). Pemberitahuan yang cukup tentang penunjukan arbiter; (2). Jalannya perkara arbitrase; (3). Tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Jika pihak yang mengajukan permohonan untuk tidak diakui dan tidak dilaksanakannya putusan dapat membuktikan salah satu dari tiga alasan tersebut di atas maka putusan arbitrase dapat tidak diakui atau dilaksanakan. Ketentuan Konvensi New York tersebut bila dikaitkan dengan arbitrase online, maka sepanjang ketiga syarat tersebut terpenuhi arbitrase online dapat dijalankan

¹⁷Art. IV Konvensi New York: "(1) To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply: (a) The duly authenticated original award or duly certified copy thereof; (b). The original agreement referred to in article II or a duly certified copy thereof;

(2). If the said award or agreements is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent"

karena Konvensi New York tidak menentukan cara prosedur arbitrase dijalankan.

UU No. 30 Tahun 1999 lebih banyak menentukan prosedur Ad hoc sedang prosedur arbitrase institusional sangat sedikit. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 34.¹⁸ Menurut Pasal 34 ini maka arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase institusi atau lembaga arbitrase sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa peraturan yang berlaku di lembaga tersebut adalah yang digunakan atau peraturan serta kesepakatan para pihak yang digunakan. Prosedur arbitrase online dapat dilakukan berdasarkan Pasal 4 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999,¹⁹ berdasarkan kesepakatan lebih dahulu baik menggunakan surat (tertulis) dengan menafsiran yang luas yaitu dengan menggunakan sarana elektronik (seperti telah dianalisis di muka). Dalam praktek, institusi-institusi penyedia jasa penyelesaian sengketa yang akan menentukan penyelesaian sengketa menggunakan sarana online atau tidak, seperti contoh adalah AAA, NovaForum, ICC. Catatan penerimaan yang diwajibkan Pasal 4 ayat 3, harus ditafsirkan sebagai catatan penerimaan yang caranya dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh adalah e-mail sudah memiliki fasilitas untuk memberitahukan bahwa sebuah e-mail sudah dibuka tetapi belum dapat

¹⁸Pasal 34 UU No. 30 Th. 1999 : (1). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak; (2). Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan oleh para pihak.

¹⁹Pasal 4 (3) UU No. 30 Th. 1999: Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

memastikan apakah yang membuka *e-mail* adalah pihak yang dituju atau tidak. Dalam berbagai pengiriman elektronik lainnya yaitu bahwa sinyal-sinyal elektronik dan digital dari telegram, telex, faksimili adalah merupakan permulaan suatu catatan penerimaan. Yang menjadi masalah adalah subyek hukum yang membuka dan atau menerima sinyal tersebut apakah mereka yang berhak atau tidak, merupakan persoalan tersendiri. Tentunya dengan kejelasan perlengkapan elektronik tersebut kepemilikannya dianggap sebagai pemegang yang sah maka kode penerimaan yang merupakan surat/catatan penerimaan dapat dianggap dilakukan oleh pemiliknya. Maka, kesepakatan sejak ditutupnya kontrak dasar bahwa mereka setuju untuk menggunakan forum penyelesaian sengketa melalui sarana online sangat diperlukan untuk menghindari adanya notifikasi yang tidak sah terhadap pengiriman-pengiriman data, messages dan records.

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 4 ayat 3 tidak terlalu mempersoalkan tentang prosedur dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Pemeriksaannya didasarkan Pasal 62 ayat 2,²⁰ yang memberikan kepercayaan luar biasa kepada para pelaksana arbitrase, sehingga pihak yang harus menjalankan putusan tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan penolakan pelaksanaan putusan dengan alasan prosedur dalam pelaksanaan arbitrase. Berbeda dengan Konvensi

²⁰Pasal 62 ay. 2, UU No. 30 Tahun 1999: Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. *Pasal 62 ayat 2 ini sering tidak masuk akal adanya rumusan yang mengaitkan putusan arbitrase dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah tidak terlalu berlebihan, suatu putusan arbitrase harus dikaitkan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.*

New York yang memberikan kesempatan untuk melakukan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dengan alasan prosedural.

Prosedur arbitrase online biasanya meliputi tahapan-tahapan yang uniform di berbagai lembaga-lembaga penyedia jasa arbitrase online yaitu mulai dari tahap permulaan, tentang pernyataan dan dokumen, persidangan/panel, permusyawaratan online, pengiriman putusan serta pelaksanaan putusan arbitrase.

Tahap permulaan mengindikasikan bahwa terdapat ketidaksepakatan antar para pihak tentang obyek kontrak seperti yang diatur dalam perjanjian arbitrase. Maka pihak yang mengajukan klaim akan mengajukan perkaranya kepada arbitrase, baik lembaga/institusi maupun arbitrase ad hoc. Pengiriman perkara oleh pemohon dapat dilakukan melalui e-mail atau biasanya tiap-tiap lembaga arbitrase sudah menyiapkan dalam situsnya form online untuk berperkara sehingga tinggal mengisi yang berarti suatu pendaftaran perkara. Dalam hal permohonan dilakukan melalui e-mail maka lembaga arbitrase atau arbiter (arbitrase ad hoc) harus memastikan bahwa pemohon adalah orang/pihak yang berhak. Lembaga arbitrase selanjutnya memberitahukan pokok sengketa kepada termohon melalui e-mail/alamat e-mail yang disediakan oleh pemohon. Dalam komunikasi tersebut termohon maupun pemohon dapat meminta atau menolak untuk mengadakan prosedur online. Jika para pihak setuju dan menurut lembaga arbitrase baik pemohon maupun termohon mempunyai kapasitas untuk menjalani prosedur arbitrase online maka prosedur online dapat dijalankan . Jika salah satu pihak menolak serta lembaga

penyedia menilai kurangnya kapasitas untuk melakukan arbitrase online maka dapat dilakukan prosedur arbitrase secara konvensional yaitu tidak menggunakan online.

Tahap pernyataan dan dokumen tertulis menentukan para pihak harus mengajukan pernyataan dan dokumen tertulis (dengan catatan bahwa tertulis termasuk di dalam tertulis secara elektronik) yang diajukan kepada arbiter dan pihak lawan dalam rangka menjamin prinsip kontradiksi. Dalam perkembangan E-com, maka kontrak-kontrak elektronik dan bukti-bukti elektronik lainnya dapat diajukan untuk mendukung argument-argumennya, termasuk bukti-bukti fisik yang dikirimkan melalui fisik ataupun melalui elektronik dengan cara scanning. Dokumen-dokumen elektronik juga dapat disediakan oleh para pihak di dalam situsnya sendiri melalui www maupun penyediaan file dalam bentuk ftp.

Tahap persidangan maka pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti elektronik merupakan yang utama sedang pemeriksaan persidangan lisan dilakukan jika diperlukan. UU No. 30 Tahun 1999 menentukan bahwa proses arbitrase secara tertulis, jika diperlukan pemeriksaan lisan akan diadakan. Dalam konteks online maka persidangan lisan, harus dilakukan dengan menggunakan sarana pernyataan lisan online yaitu secara fisik para pihak bertemu melalui online dengan menggunakan teknologi VoIP atau video streaming, sehingga para bertemu secara 'fisik' dalam dunia maya. Maka persidangan fisik dunia maya dapat dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi atau pertukaran bukti. Namun cukup juga bila dilakukan melalui pertukaran e-mail atau melalui penggunaan IRC.

Tahap permusyawaratan dilakukan dimana pembacaan putusan tidak perlu dilakukan yaitu setelah putusan online dilakukan maka langsung dilakukan pemberitahuan secara online akan adanya putusan dan putusan dilakukan dengan cara mengirim melalui pemanfaatan sarana elektronik atau online. Pasal 55 UU No. 30 Tahun 1999 harus ditafsirkan bahwa pengucapan putusan dalam versi online melalui penggunaan internet relay chat (IRC) dapat dipersamakan dengan pengucapan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut atau juga menggunakan teknologi VoIP. Dengan menggunakan teknologi ini maka cukup jika dilakukan pemberitahuan mengenai adanya putusan melalui e-mail atau menempatkan dalam situs web yang bersangkutan oleh majelis arbitrase atau versi AS juri arbitrase.

Putusan arbitrase online mempunyai kesulitan menurut Konvensi New York, apabila pihak yang mengajukan permohonan untuk pengakuan dan pelaksanaan arbitrase harus menyerahkan *'a duly authenticated original award or duly certified copy thereof'* (Art. IV [1] Konvensi New York). Hal ini berarti bahwa tanda tangan dari arbitrator harus diotentikasi oleh pihak ketiga yang dipercaya untuk itu, seperti oleh korps diplomatik atau konsuler. Persyaratan yang ketat ini dilakukan karena arbitrator tidak hadir secara fisik konvensional dan merupakan pihak dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Demikian juga apabila dirujuk pada Pasal 54, 59 ayat 1, 2, Pasal 63 UU No. 30 Tahun 1999 berarti bahwa putusan arbitrase nasional harus putusan tertulis, asli dan ditanda-tangani oleh arbiter atau majelis arbitrase. Putusan arbitrase online, apabila menggunakan aturan-aturan Konvensi

New York dan UU No. 30 Tahun 1999 seperti tersebut di atas dengan interpretasi sempit sesuai dengan bunyi Pasal yang bersangkutan maka jelas Putusan Arbitrase online akan tidak sah. Namun, seperti halnya dalam kontrak-kontrak online melalui E-com dimana originalitas, penanda-tanganan dan keaslian serta otentifikasi ditafsirkan menurut tata cara teknologi internet jelas dapat dipertanggung jawabkan. Suatu putusan arbitrase online dapat dimintakan originalitas, tanda-tangan melalui elektronik atau digital dan otentifikasinya dilakukan oleh lembaga semacam CA (Certificate Authoritation) maka putusan arbitrase online sah adanya dan dapat dilakukan dengan baik. Oleh karena itu maka diperlukan interpretasi yang luas terhadap hubungan hukum arbitrase online karena teknologi internet membutuhkan wawasan dan karakter terbuka terhadap hukum untuk keadilan dan perlindungan kepentingan hak-hak para pihak yang melakukan hubungan hukum online, sebelum peraturan perundangan yang berkarakter online diterbitkan secara memadai yang bersifat fasilitatif.

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Pertumbuhan kontrak-kontrak melalui online dewasa ini telah meningkat pesat sekaligus juga menumbuhkan konflik-konflik yang tidak mudah diselesaikan karena hubungan hukum melalui online adalah khusus karena borderless dan paperless. Oleh karena itu perlu diciptakan sarana khusus untuk menyelesaikan konflik tersebut yaitu melalui Online Dispute Resolution (ODR), saat ini yang cukup berkembang adalah arbitrase online. Arbitrase online berbeda dengan arbitrase internasional karena kekhasannya terletak pada penggunaan teknologi internet untuk melakukan hubungan hukum yaitu beracara, menentukan prosedur, berkomunikasi, serta pelaksanaan keputusan arbitrase.
2. Solusi yang harus dilakukan adalah perlunya memantapkan harmonisasi dan unifikasi hukum yang diberlakukan pelayan jasa arbitrase online. Agar putusan arbitrase online dapat dilaksanakan dalam hukum nasional Indonesia maka perlu interpretasi beberapa Pasal dalam UU No. 33 Tahun 1999 antara lain Pasal 1 angka 1, 3, Pasal 4 ayat 1, 2, 3, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 59 ayat 2. Dengan interpretasi yang terbuka, meluas maka arbitrase online sebenarnya untuk sementara dapat terlaksana dan putusannya dapat diberlakukan sepanjang disepakati para pihak karena prinsip *final and binding*.

B. Saran

1. Perkembangan E-com yang pesat serta didasarkan pada kontrak elektroniknya dan menggunakan sarana internet perlu diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia dengan memperbaiki sarana hukum yang memungkinkan para pelaku usaha online untuk mendapatkan perlindungan hukum hak-haknya. Hukum perlu berfungsi sebagai fasilitator dalam pertumbuhan E-com karena tidak mungkin sarana online diikuti oleh hukum yang cenderung lambat. Fungsi fasilitatif termasuk penyelesaian konflik-konflik yang muncul akibat dari hubungan hukum online sehingga berkarakter online perlu dikembangkan. Perkembangan ODR menjadi contoh penyelesaian konflik yang berkarakter online.
2. UU No. 30 Tahun 1999 perlu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ODR khususnya arbitrase online. Agar dapat mengikuti perkembangan ODR maka UU No. 30 Tahun 1999 harus berkarakter online yang meliputi bentuk perjanjian arbitrase, prosedur arbitrase yang efisien dan efektif, serta putusan arbitrase yang harus dapat dilaksanakan dengan baik di berbagai negara dunia ini sehingga perlu menyesuaikan dengan hukum yang berkembang di dunia cyber yaitu *lex informatica*.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalton, 1980, Legal Diagnostic, , 25, Computer and Law, 13.
- Colin Tapper, 1982, Computer Law, Longman Group Limited, Longman House, Burnt Mill, Harlow, Essex, UK,
- Dias, R,W,M, 1976, Jurisprudence, Butterworths, London.
- Dror, Yehezkel, 1977, Ventures in Policy Science (Concept and Application), Elsevier, New York.
- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, 2006, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gijssels, Jan - Mark van Hoecke, 1982, Wat is Rechtstheorie?, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerp.
- Hadjon, Philipus, M, tanpa tahun, Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat), UNAIR.
- Henkel, M.M. - (tanpa tahun), Legal Argumentation In Civil Law and in Common Law, (reader) Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid.
- Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2006, Bayumedia Publishing, Malang,
- Iman Sjahputra Tunggal & Arif Djohan Tunggal, 1997, Peraturan Perundang-undangan, Hak Cipta, Paten, dan Merek, Harvarindo, Jakarta.
- Katz, M., Ed., 1997, Technology Forecast: 1997 (also 1998), Menlo Park Calif, Price Water house World Technonology Center.
- Luhmann, Niklas, 1965, Grundrechte Als Institution,
- Ponte, Lucille M. and Thomas D Casvenagh, 2005, Cyberjustice, Online Dispute Resolution (ODR) for E-Commerce, Prentice Hall, New Jersey, Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978, Law in Society in Transition, Harper Colophon Book, New York.
- Magnis Suseno, von, 2000, Membangun Kembali Negara Hukum (Beberapa Pertimbangan Mendasar), Makalah pada Seminar Nasional Paradigma Ilmu Hukum dalam Millenium Ketiga tanggal 18 Nopember 2000., UNDIP, Semarang.

- Meuwissen, D.H.M., 1994, Teori Hukum, Pro Justitia No. 2 Tahun 1994.
- Muis, A, 2001, Indonesia di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Napier, 1992, The Future of Information Technology Law, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dibidang Hukum Teknologi Informasi di Queen Mary and Westfield College), University of London, London
- Paustinus Siburian, 2004, Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik), Djambatan, Jakarta.
- Priyatna, Abdurrasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar), Fikahati Aneska.
- Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Susanto, IS, 2000, Mengembangkan Sistem Hukum yang Berpihak pada Rakyat Banyak, Makalah pada Seminar Nasional Paradigma Ilmu Hukum dalam Millenium Ketiga tanggal 18 Nopember 2000., UNDIP, Semarang.
- Suyud Margono, 2004, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Turban, Mc. Lean, Wetherbe, 1999, Information Technology for Management, John Wiley and Sond Inc., New York.
- Van Dijk, P, ed., 1985, Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.
- Yahya Harahap, M., 2004, Arbitrase, Sinar Grafika, Jakarta.